

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI DESA BANGUNMULYO KECAMATAN PAKEL KABUPATEN TULUNGAGUNG

Submission date: 20-Dec-2023 06:04AM (UTC+0900) *by Jurnal Mediasosian*

Submission ID: 2263000249

File name: Jurnal_Endik_EKo_Wahyudi_1.docx (1.09M)

Word count: 2631

Character count: 18632

1
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3
TAHUN 2021 TENTANG DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
4
SOSIAL (DTKS) DI DESA BANGUNMULYO KECAMATAN
PAKEL KABUPATEN TULUNGAGUNG

Author by :
Endik Eko Wahyudi
202002020063

28
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri

ABSTRAK

Endik Eko Wahyudi, NIM. 202002020063. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Pembimbing I: Dr. Suwarno, M.Si

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dengan faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung telah berhasil dilaksanakan dengan baik, sukses dan lancar. Penyaluran bantuan kesejahteraan sosial kepada masyarakat Desa Bangunmulyo melalui DTKS terdokumentasi dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. DTKS memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi kesenjangan sosial. Aspek komunikasi yang efektif, sumberdaya manusia yang memadai, disposisi positif masyarakat, struktur birokrasi yang terorganisir, dan upaya mengatasi kendala infrastruktur teknologi telah berkontribusi terhadap keberhasilan program. Implikasinya, program DTKS dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi warga desa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. Faktor pendukungnya meliputi komitmen pemerintah desa, partisipasi aktif masyarakat, koordinasi antarinstansi dan sosialisasi sedangkan faktor penghambatnya meliputi infrastruktur teknologi kurang memadai, keterbatasan sumber daya manusia dan perbedaan persepsi masyarakat.

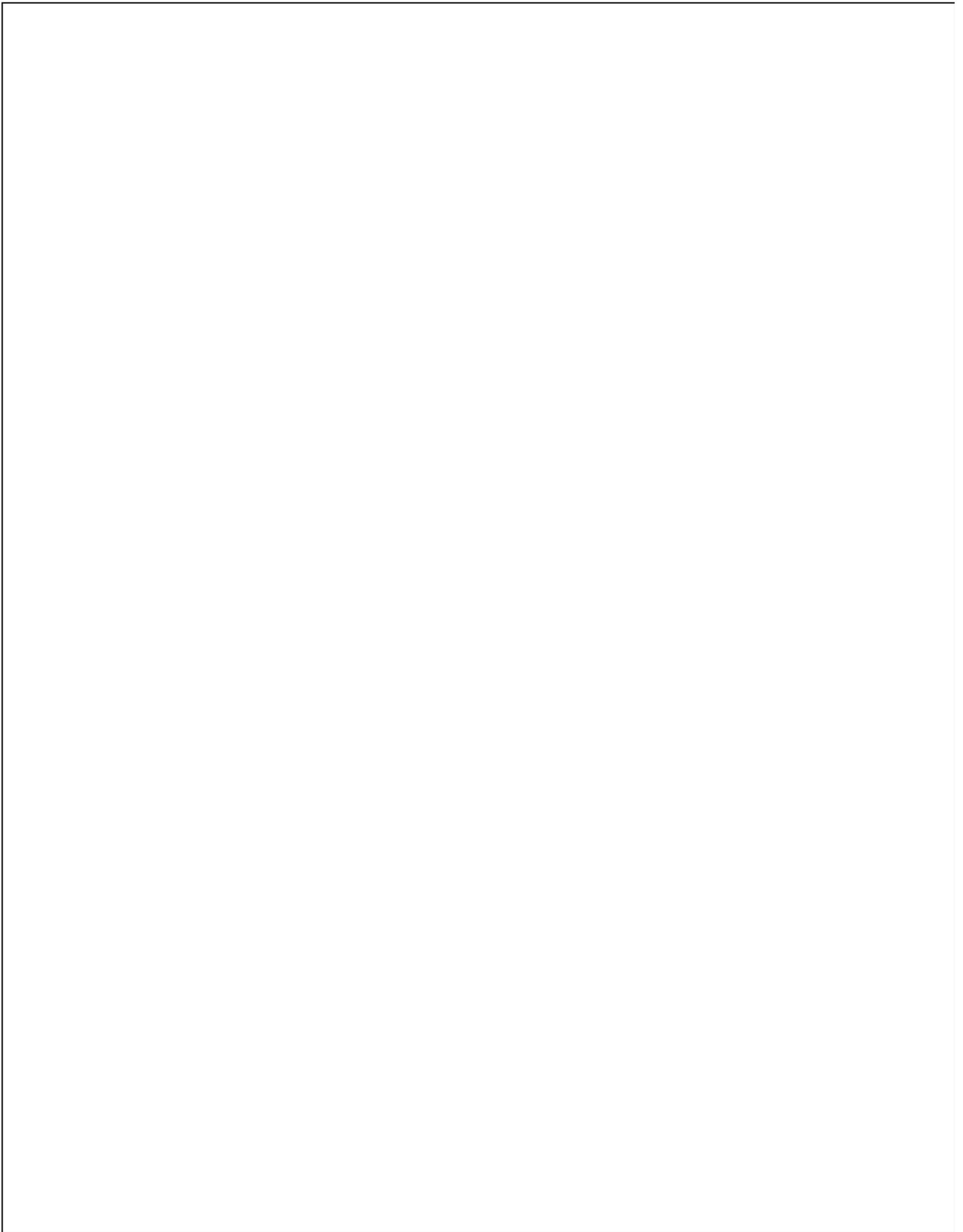
Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, DTKS

ABSTRACT

Endik Eko Wahyudi, NIM. 202002020063. Implementation of Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021 concerning Integrated Social Welfare Data (Dtk) in Bangunmulyo Village, Pakel District, Tulungagung Regency. First supervisor: Dr. Suwarno, M.Si

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021 concerning integrated data on social welfare (DTKS) in Bangunmulyo Village, Pakel District, Tulungagung Regency with supporting and inhibiting factors. This research uses a qualitative approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The data analysis used in this research is the interactive analysis of Miles and Huberman. The implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021 concerning Integrated Social Welfare Data (DTKS) in Bangunmulyo Village, Pakel District, Tulungagung Regency has been successfully implemented well, successfully and smoothly. The distribution of social welfare assistance to the people of Bangunmulyo Village through DTKS is well documented and in accordance with established procedures. DTKS provides significant benefits to the community in improving their quality of life and reducing social inequality. Aspects of effective communication, adequate human resources, positive community disposition, organized bureaucratic structure, and efforts to overcome technological infrastructure constraints have contributed to the success of the program. The implication is that the DTKS program can provide significant benefits to villagers in improving social welfare and alleviating poverty. Supporting factors include village government commitment, active community participation, inter-agency coordination and socialization while inhibiting factors include inadequate technological infrastructure, limited human resources and differences in community perceptions.

Keywords: Implementation, Public Policy, DTKS



PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. DTKS merupakan sebuah sistem basis data yang mencakup informasi terkait penerima bantuan sosial dari berbagai program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Implementasi DTKS menjadi perhatian utama di wilayah Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, karena desa ini menghadapi tingkat kebutuhan sosial yang signifikan dan keragaman program kesejahteraan sosial yang berbeda. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut tentang implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang DTKS di Desa Bangunmulyo dan bagaimana peraturan ini berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Di Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, implementasi DTKS menjadi perhatian utama karena desa tersebut memiliki tingkat kebutuhan sosial yang signifikan dan keragaman program kesejahteraan sosial yang berbeda. Desa Bangunmulyo merupakan salah satu desa di Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Wilayah ini memiliki keunikan karena terdiri dari masyarakat dengan tingkat kebutuhan sosial yang beragam. Banyak keluarga di desa ini berada dalam kondisi ekonomi rendah dan menghadapi berbagai tantangan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah telah memberlakukan berbagai program kesejahteraan sosial, seperti bantuan

sosial tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), dan lainnya.

Sebelum implementasi DTKS, distribusi bantuan sosial sering kali mengalami kendala, seperti tumpang tindih, kesalahan data, dan ketidakefektifan dalam penyaluran. Hal ini menyebabkan sebagian penerima manfaat tidak mendapatkan bantuan secara tepat dan adil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Peraturan ini bertujuan untuk mengintegrasikan data penerima manfaat dari berbagai program kesejahteraan sosial ke dalam satu sistem basis data, sehingga proses identifikasi penerima manfaat dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat.

METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten yang terlibat dalam implementasi DTKS. Selain itu, pengamatan langsung dan analisis dokumen terkait implementasi DTKS juga dilakukan untuk memperkuat validitas data. Para informan yang terlibat dalam penelitian ini termasuk aparatur desa, petugas sosial, dan penerima manfaat dari program kesejahteraan sosial di Desa Bangunmulyo. Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan terstruktur untuk menggali informasi tentang proses implementasi DTKS, tantangan yang dihadapi, dan dampak yang dihasilkan.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

1. Bapak Suradi selaku Kepala Desa Bangunmulyo
2. Ibu Sri Agustin selaku Bendahara Desa
3. Bapak Pujiono selaku Kasi Pelayanan

4. Bapak Kastubi selaku Operator komputer dan Informasi Desa Bangunmulyo
5. Setiaji, A.KS selaku pengelola DTKS di Dinas Sosial Kab.Tulungagung
6. Bapak Selo Harsono selaku sesepuh desa, ketua paguyuban petani Desa Bangunmulyo
7. Bapak Agung Ali Prasetyo selaku pemimpin agama masyarakat Desa Bangunmulyo
8. Ny. Darsih dan Ny. Kustriwi Selaku warga yang terdaftar dalam DTKS dan telah menerima bantuan dari pemerintah

Tinjauan Teori

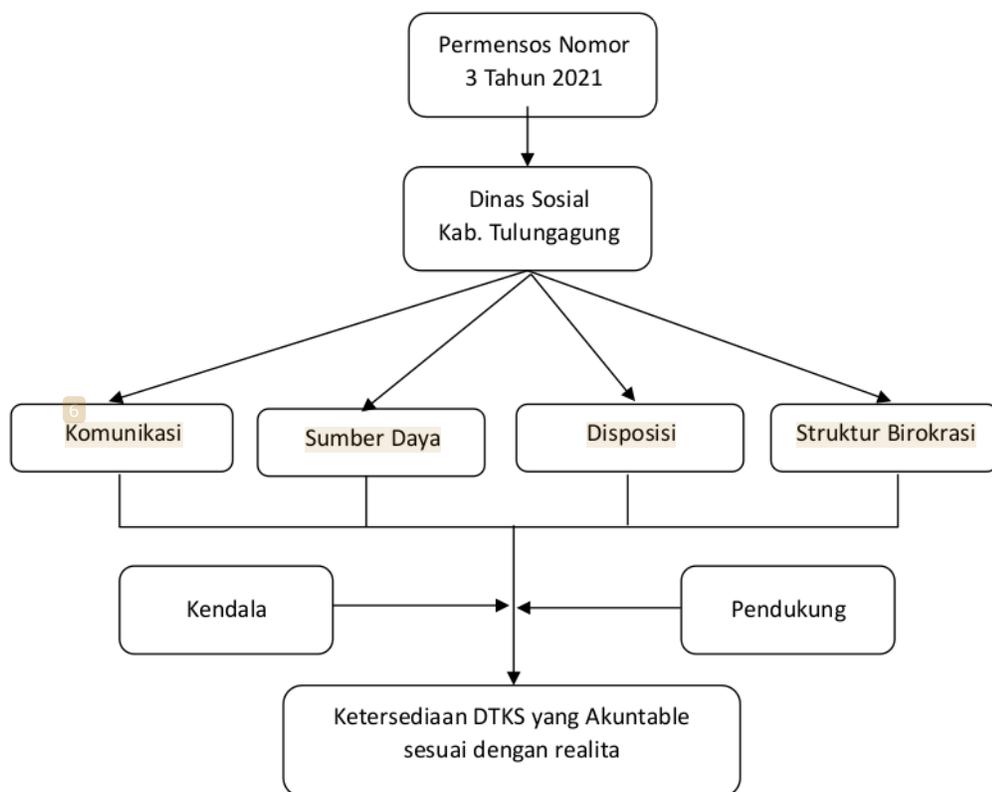
Implementasi Kebijakan Publik

Istilah kebijakan² seringkali disamakan dengan istilah *policy*. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia. Menurut Hoogerwerf (dalam Sjahrir, 1988) pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, yang merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Anderson (1978), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor seperti pejabat, kelompok, serta instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam⁵ pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi,

prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2005)

Kerangka Konsep Penelitian



Gambar1. Kerangka Konseptual Penelitian Implementasi Kebijakan DTKS

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung telah dilakukan dengan berbagai upaya dan berhasil dengan baik. Implementasi ini mencakup proses pendaftaran, validasi data, penyaluran bantuan, dan pemantauan serta evaluasi program kesejahteraan sosial. Desa Bangunmulyo berhasil mengintegrasikan data penerima manfaat dari berbagai program bantuan sosial, sehingga memudahkan koordinasi dan mengurangi potensi tumpang tindih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang DTKS di Desa Bangunmulyo telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial. Integrasi data dari berbagai program kesejahteraan sosial memungkinkan identifikasi penerima manfaat yang lebih akurat dan meminimalkan potensi tumpang tindih. Selain itu, DTKS juga mempermudah koordinasi antara instansi terkait dalam mengelola data dan menyusun rencana program kesejahteraan sosial di tingkat desa. Adanya satu sistem basis data yang terintegrasi mengurangi kerumitan dalam mengumpulkan, menyimpan, dan memproses informasi tentang penerima manfaat. Proses pendaftaran dan verifikasi data menjadi lebih efisien dengan adanya DTKS. Penerima manfaat hanya perlu mendaftarkan diri sekali dan data mereka akan tervalidasi secara berkala. Hal ini mengurangi beban administratif bagi penerima manfaat dan petugas sosial di desa. Selain itu, implementasi DTKS juga meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Masyarakat dapat memantau dan memverifikasi informasi mengenai penerima manfaat secara langsung, sehingga mengurangi potensi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.



Gambar 1 Pendopo Desa Bangunmulyo

13 Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi selama implementasi DTKS di Desa Bangunmulyo. Beberapa tantangan meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan data, kualitas infrastruktur teknologi informasi, dan tingkat literasi digital masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Diskusi melibatkan pemahaman mendalam tentang hasil penelitian dan penafsiran terhadap temuan-temuan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang DTKS telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial di Desa Bangunmulyo. Integrasi data dari berbagai program kesejahteraan sosial membantu mengatasi beberapa permasalahan sebelumnya, seperti tumpang tindih dalam penerima manfaat dan ketidakakuratan data. Adanya DTKS juga mempermudah proses monitoring dan evaluasi program kesejahteraan sosial. Data terpadu ini memungkinkan pemantauan yang lebih akurat terhadap pencapaian target dan dampak program. Dengan pemantauan yang lebih baik, pemerintah dapat melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi

33

keberhasilan dan kegagalan program serta memperbaiki program yang belum berjalan dengan baik. Hal ini di tegaskan oleh Bapak Suradi selaku Kepala Desa Bangunmulyo sebagai berikut.

“Jadi begini Pak, Sakjane tujuan utama dari Program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu adalah untuk memetakan dan mengidentifikasi masyarakat miskin dan rentan tidak hanya di sini saja melainkan juga di seluruh Indonesia, serta menyediakan bantuan sosial yang tepat sasaran dan efektif kepada mereka. Adapun tujuan-tujuan lain dari program DTKS antara lain tentu saja Mengurangi kemiskinan: Dengan mengidentifikasi dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan, program DTKS diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia kemudian meningkatkan efektivitas program bantuan sosial: Dengan menggunakan basis data terpadu dan proses verifikasi yang ketat, program DTKS diharapkan dapat menyediakan bantuan sosial yang tepat sasaran dan efektif kepada masyarakat yang membutuhkan. Data yang bersifat online dan live-time di internet juga dapat mencegah penyalahgunaan dana bantuan sosial: Program DTKS melakukan proses verifikasi yang ketat dan melakukan penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Karena sudah serba online akhirnya menjadi tampak jelas atau transparan, akhirnya mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Program DTKS memungkinkan informasi tentang penerima bantuan sosial dan penggunaan dana bantuan sosial dapat diakses secara transparan oleh publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas program tersebut. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, program DTKS diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia secara keseluruhan.” **Bapak Suradi selaku Kepala Desa Bangunmulyo, wawancara 2 Februari 2023**

Namun, meskipun implementasi DTKS memberikan banyak manfaat, penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam mengelola data dan sistem informasi. Pengelolaan data yang kompleks dan sensitif memerlukan tenaga terlatih yang mampu mengelola dan melindungi data dengan baik. Kurangnya jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang

terampil dapat menghambat kelancaran implementasi DTKS. Selain itu, permasalahan teknis dan kualitas infrastruktur teknologi informasi juga menjadi tantangan tersendiri. Pemutakhiran data secara berkala memerlukan sistem informasi yang andal dan mendukung, serta akses internet yang stabil. Di daerah pedesaan seperti Desa Bangunmulyo, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi sering kali masih terbatas. Jaringan internet yang lambat atau bahkan tidak ada dapat menghambat proses pendaftaran dan verifikasi data.

Peneliti: Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Apakah ada tantangan atau hambatan dalam mengumpulkan sumber daya untuk implementasi DTKS di Desa kita?

Bapak Pujiono: Ya, tentu saja ada. Tantangan utama adalah keterbatasan anggaran, karena sumber daya keuangan memang sangat penting untuk mengimplementasikan kebijakan DTKS. Selain itu, terkadang kita juga kesulitan mendapatkan sumber daya manusia yang memadai, karena persaingan di pasar tenaga kerja saat ini sangat ketat. Namun, dengan melakukan evaluasi secara terus-menerus dan memperbaiki koordinasi antar bagian, kami yakin dapat mengatasi tantangan tersebut.

Peneliti: Terima kasih banyak Bapak Pujiono, jawaban Bapak sangat membantu. Itu saja pertanyaan dari saya, semoga Desa kita dapat mengimplementasikan kebijakan DTKS dengan baik **Wawancara dengan Bapak Pujiono Kaur Bidang Pelayanan, 3 Februari 2023.**



Gambar 3. Rapat Koordinasi kepala Desa se-Kec. Pakel tentang program DTKS di Kecamatan Pakel

Aspek partisipasi masyarakat juga menjadi penting dalam implementasi DTKS. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat DTKS dan pentingnya berpartisipasi aktif dalam pengelolaan data. Peningkatan literasi digital dan sosialisasi yang efektif tentang DTKS perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dapat membantu memperbaiki dan memvalidasi data dengan lebih baik, sehingga meminimalkan potensi kesalahan dan penyalahgunaan program. Meskipun implementasi DTKS di Desa Bangunmulyo menunjukkan kemajuan positif, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi. Beberapa kendala termasuk keterbatasan sumber daya manusia,

teknis, dan infrastruktur dalam pengelolaan data serta potensi kesalahan data yang dapat mempengaruhi akurasi program. Selain itu, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan data menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.

KESIMPULAN

¹ Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial. Integrasi data dari berbagai program kesejahteraan sosial telah membantu mengatasi permasalahan tumpang tindih dalam penerima manfaat dan meningkatkan transparansi dalam distribusi bantuan. Proses pendaftaran dan verifikasi data yang lebih efisien dengan DTKS membantu mengurangi beban administratif dan memberikan kemudahan bagi penerima manfaat dan petugas sosial. Selain itu, pemantauan dan evaluasi program kesejahteraan sosial menjadi lebih akurat dan berkala, sehingga memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif dalam memperbaiki program yang belum optimal.

Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, permasalahan teknis, dan partisipasi masyarakat masih perlu diberi perhatian agar implementasi DTKS berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Peningkatan sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan data, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang intensif menjadi langkah yang perlu diambil.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah setempat terus meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dalam mengelola data dan program kesejahteraan sosial. Selain itu, sosialisasi yang

intensif tentang manfaat DTKS dan pentingnya partisipasi aktif masyarakat perlu dilakukan guna mendukung kelancaran implementasi program ini. Pemantauan dan evaluasi secara berkala juga penting untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan program kesejahteraan sosial di masa mendatang. hal ini dapat di maknai dalam uraian berikut. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran diajukan untuk meningkatkan implementasi DTKS di Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung:

1. Pemerintah perlu melakukan pelatihan dan pendidikan bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan data dan teknologi informasi. Dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, pengelolaan data dapat berjalan lebih efisien dan akurat.
2. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi di wilayah pedesaan seperti Desa Bangunmulyo menjadi kunci untuk mendukung implementasi DTKS. Investasi dalam jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai akan meningkatkan kualitas pengelolaan data.
3. Sosialisasi yang intensif tentang manfaat DTKS dan pentingnya partisipasi aktif masyarakat perlu dilakukan. Partisipasi masyarakat akan meningkatkan kualitas dan validitas data, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial.
4. Pemantauan dan evaluasi program secara berkala perlu diadakan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan program kesejahteraan sosial di masa mendatang. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam penyusunan kebijakan dan program.

Daftar Pustaka

- Adikara, P. (2021). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Masih Terhambat, Penanganan oleh Pemerintah Daerah Dinilai Masih Belum Optimal. *Sonora id online*. Diakses dari <https://www.sonora.id/read/422924416/data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks-masih-terhambat-penanganan-oleh-pemerintah-daerah-dinilai-masih-belum-optimal>
- BPK. (2017). JDIH BPK Republik Indonesia: Database Peraturan. *Website BPK*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/>
- DPR. (2021). Pentingnya Pemutakhiran DTKS Guna Sukseskan Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial. *Website DPR*. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35437/t/Pentingnya+Pemutakhiran+DTKS+Guna+Sukseskan+Pelaksanaan+Program+Perlindungan+Sosial>
- _____. (2021). Tumpang Tindih Bansos Akibat DTKS Lama Tidak Diperbaharui. *Website DPR*. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33027/t/Tumpang+Tindih+Bansos+Akibat+DTKS+Lama+Tak+Diperbaharui>.
- Hariningsing, I.S. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai di Era Pandemi (Studi Kasus di Kecamatan Genteng Kota Surabaya). *Jurnal Repository UNTAG*. Diakses dari <http://repository.untag-sby.ac.id/10963/8/JURNAL.pdf>
- Miles, M. B. & Huberman, M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Moleong, L.J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI DESA BANGUNMULYO KECAMATAN PAKEL KABUPATEN TULUNGAGUNG

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|--|----|
| 1 | repository.unsri.ac.id Internet Source | 3% |
| 2 | idtesis.com Internet Source | 3% |
| 3 | eprints.ipdn.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | repository.unair.ac.id Internet Source | 2% |
| 5 | journal.uinmataram.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | repository.ub.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | Submitted to Sriwijaya University Student Paper | 1% |
| 8 | digilib.itb.ac.id Internet Source | 1% |

| | | |
|----|--|------|
| 9 | core.ac.uk Internet Source | 1 % |
| 10 | Stella Erdityaningrum Januarti, Isnaini Rodiyah. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016 Publication | 1 % |
| 11 | ejournal.kemsos.go.id Internet Source | 1 % |
| 12 | fliphtml5.com Internet Source | 1 % |
| 13 | ojs.ummetro.ac.id Internet Source | 1 % |
| 14 | www.dinsos.solokkab.go.id Internet Source | 1 % |
| 15 | journal.ipm2kpe.or.id Internet Source | <1 % |
| 16 | geograf.id Internet Source | <1 % |
| 17 | banten.antaraneews.com Internet Source | <1 % |
| 18 | es.scribd.com Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 19 | lib.ui.ac.id Internet Source | <1 % |
| 20 | garuda.kemdikbud.go.id Internet Source | <1 % |
| 21 | id.unionpedia.org Internet Source | <1 % |
| 22 | jurnal.buddhidharma.ac.id Internet Source | <1 % |
| 23 | www.ufmg.br Internet Source | <1 % |
| 24 | mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id Internet Source | <1 % |
| 25 | repositori.usu.ac.id Internet Source | <1 % |
| 26 | repository.umsu.ac.id Internet Source | <1 % |
| 27 | repository.unimilitar.edu.co Internet Source | <1 % |
| 28 | repository.ut.ac.id Internet Source | <1 % |
| 29 | vdocuments.site Internet Source | <1 % |
| 30 | www.ejournal.radenintan.ac.id Internet Source | <1 % |

31 www.yesisupartoyo.com

Internet Source

<1 %

32 Pita Fitria Airmas, Rosman Ilato, Yanti Aneta.
"POVERTY REDUCTION THROUGH THE
FAMILY HOPE PROGRAMME", Public Policy
Journal, 2023

Publication

<1 %

33 Tony Pathony, Cornelis Deda. "Implementasi
Kebijakan Bantuan Pangan Non-Tunai Melalui
Elektronik Warung Gotong Royong (E-
Warong) di Kecamatan Subang Kabupaten
Subang", The World of Public Administration
Journal, 2020

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On